

Kolaborasi dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

Melly Fadillah¹, Wiro Oktavius Ginting²

^{1,2} Universitas Sumatera Utara

e-mail: mellyfadillah2001@gmail.com¹, wirooktaviusginting@usu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Kolaborasi dalam Pembangunan Pariwisata berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telagah kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat . Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, Kepala Desa Telagah, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Telagah, Pihak Pengelola wisata, Masyarakat dan Pengunjung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya telah terjalinnya Kerjasama melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan. Kerjasama dalam pembangunan pariwisata Desa Telagah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Namun ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, seperti minimnya pengawasannya pemerintah terhadap program-program yang dijalankan, kesadaran masyarakat dan sarana prasarana yang tidak memadai sebagai standar sebuah wisata.

Kata Kunci: *Kolaborasi, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Sadar Wisata, Kabupaten Langkat*

Abstract

This research aims to describe and analyze how Collaboration in Tourism Development is based on Community Empowerment in Telagah Village, Sei Bingai District, Langkat Regency. The research method used in this research is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out using interviews, observation, documentation and literature study. The research informants consisted of the Head of the Tourism Division of the Langkat Regency Tourism and Culture Office, the Head of Telagah Village, the Head of the Telagah Village Tourism Awareness Group, tourism management, the community and visitors. The results of the research show that cooperation has been established through various activities, such as training, mentoring, and providing assistance. Collaboration in tourism development in Telagah Village has had a positive impact on the local community. However, there are several problems found in the field, such as minimal government supervision of the programs being implemented, public awareness and inadequate infrastructure as standard for tourism.

Keywords : *Collaboration, Tourism, Community Empowerment, Tourism Awareness Group, Langkat Regency*

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu kontribusi utama bagi pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang dan negara maju. Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional, meningkatkan pendapatan pajak dan menciptakan lapangan

kerja tambahan (Gokovali & Bahar, 2006; Jayathilake, 2013; Kadir & Karim, 2012; Chew Ging, 2008)

Menurut Yoeti (1987, h.286 dalam Primadany, S. R. 2013) Dinas Pariwisata adalah badan kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan pada umumnya baik tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Potensi wisata Indonesia yang berupa 17.508 pulau-pulau yang terbentang sejauh 5.120 km dengan iklim tropis sejuk baik di darat maupun di pantai dan laut. Tetapi berdasarkan data statistik Organisasi Pariwisata Dunia dari 1,3 miliar orang wisatawan di dunia hanya 4 juta saja yang berkunjung ke Indonesia sementara sisanya banyak berkunjung ke Malaysia, Thailand, dan negara Eropa. Melihat permasalahan di atas artinya minat para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Indonesia maupun lokal rendah, karena selama ini pariwisata Indonesia masih kurang maksimal dalam mengembangkannya.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari alam, budaya, sejarah, hingga kuliner. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, Sumatera Utara menduduki peringkat ke-11 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan jumlah sebesar 89.145 wisatawan. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara, Sumatera Utara berada di peringkat ke-8 dengan jumlah 5,68 juta kunjungan. (Bps.go.id. Diakses pada 30 Maret 2023).

Pada tahun 2020, sebelum pandemi, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar Rp104,4 triliun. Namun, pada tahun 2021, di tengah pandemi, sektor pariwisata hanya menyumbang devisa sebesar Rp35,6 triliun, dijelaskan oleh Pusat Studi Otonomi Daerah, POSDA (2022). Penurunan pengunjung tersebut dimulai pada Maret 2020 dimana bertepatan dengan diberlakukannya *social distancing* di Indonesia. Keadaan tersebut masih membekas pada sektor pariwisata sehingga dibutuhkan adanya perbaikan. Mengingat saat ini kondisi pandemi sudah tidak seburuk sebelumnya. (Bps.go.id. Diakses pada 30 Maret 2023).

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Langkat Menurut Tahun 2014- 2022

No	Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Total
1	2014	40,433	8,567	49,000
2	2015	47,139	3,495	50,634
3	2016	13,715	4,885	18,600
4	2017	22,604	8,396	31,000
5	2018	88,437	11,667	100,104
6	2019	89,728	11,672	101,400
7	2020	104,776	4,528	109,304
8	2021	35,658	-	35,658
9	2022	43,165	-	43,165

(Sampai Mei 2022)

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat, 2023

Menurut data pada tabel 1, dapat dilihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Langkat mulai dari tahun 2014 sampai 2022, terlihat jelas penurunan angka kunjungan wisatawan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dikarenakan pandemik. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu pengelola wisata alam di Desa Telagah melalui wawancara dengan peneliti. yang menyatakan bahwa:

Berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa pandemi covid-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap pengembangan wisata lokal di Desa Telagah, maka dari itu penting untuk melakukan pengembangan wisata saat ini guna meningkatkan minat pengunjung kembali dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan

ekonomi lokal di suatu daerah mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang dapat diukur dengan pengurangan kemiskinan di daerah tersebut. Sektor pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu alternatif pengentasan kemiskinan karena sektor tersebut memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil sampai di perdesaan.

Pariwisata diyakini dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan atau sebagai *agent of development* sekaligus menjadi penggerak dalam mempercepat pembangunan itu sendiri (Kaikara, 2020). Mengelola sektor pariwisata membutuhkan berbagai strategi, untuk memaksimalkan potensi yang ada serta dibutuhkan sebuah kerja sama dimana Kolaborasi pemerintah dalam pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan manusia melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor pariwisata, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap masyarakat setempat. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan manusia, partisipasi aktif masyarakat, dan keberlanjutan dalam pengembangan sektor pariwisata, hal ini juga dapat melibatkan bidang Universitas sebagai mitra kerja sama sebagai bidang yang mengorganisir kegiatan sosial dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan.

Sulistyaningsih, dkk (2017) mengatakan bahwa kolaborasi pemerintah dalam pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan manusia membutuhkan komitmen, koordinasi, dan komunikasi yang kuat antara pemerintah, sektor pariwisata, dan komunitas lokal. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, sambil melestarikan dan menghormati sumber daya alam dan budaya yang ada. Pemberdayaan masyarakat dapat membantu masyarakat untuk memiliki kepercayaan diri, kemandirian, serta mampu mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi di wilayahnya. masyarakat juga dikenal dengan sebutan *community empowerment* atau *community development*, dan menjadi fokus program-program pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Pengembangan pariwisata dapat menjadi sumber pemberdayaan masyarakat jika dilakukan dengan benar dan tepat sasaran.

Desa Telagah merupakan salah satu desa wisata yang terletak di kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara. Desa Telagah termasuk kedalam kalangan wilayah yang sangat pesat dalam pengembangan wisatanya, bukan hanya dari sisi lokasi namun keasrian budayanya menjadi menarik untuk wisatawan berkunjung ke desa Telagah ini.

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan pada salah satu wisata di Telagah (Danau Karona) pada Tahun 2023 Sampai Sekarang

No	Bulan	Jumlah wisatawan	Dalam kota	Luar Kota	Pendapatan
1	Januari	1.200	30%	70%	Rp. 24.000.000
2	Februari	950	40%	60%	Rp. 19.000.000
3	Maret	900	20%	80%	Rp. 18.000.000
4	April	1.500	25%	75%	Rp. 30.000.000

Sumber : Data Pemasukan Wisata Danau Karona , 2023

Wisatawan yang berkunjung ke wisata tersebut hanya ramai di waktu-waktu tertentu, misalnya di hari libur saja atau hari-hari libur lainnya, sumber promosi yang dimanfaatkan oleh pemilik wisata tersebut hanya melalui pengunjung yang memposting kemedi sosial.

Desa Telagah memiliki potensi wisata yang tinggi untuk menarik wisatawan berkunjung ke Desa Telagah, berbagai wisata yang dikelola oleh warga setempat dapat menjadi salah satu pendorong pemberdayaan masyarakat setempat, namun ada pula hal yang menjadi masalah dalam pengembangan wisatanya seperti Kurangnya kualitas sarana prasarana yang dimiliki wisata tersebut dapat mempengaruhi jumlah wisatawan dan juga memberi efek

kepada pendapatan yang tidak seimbang, hal ini juga sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya. Masalah ini tidak hanya menyoroti bagaimana masyarakat mengelola wisata tersebut tetapi bagaimana peran pemerintah dalam penganggaran.

Pada proses pengembangan wisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata di desa Telagah ini juga mengalami beberapa hambatan. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pengunjung Wisata Danau Karona melalui wawancara dengan peneliti. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapat informasi bahwa sumbernya infrastruktur yang seharusnya menjadi pendukung wisata malah membuat wisatawan merasa trauma untuk datang kembali, mulai dari jalanan yang berlubang, tidak adanya pembatas pinggir jalan (jalan cenderung pinggirannya jurang) dan minimnya pencahayaan dari lampu jalan sepanjang lokasi menuju ke wisata tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan soal masalah infrastruktur, penulis juga menemukan kurangnya akses modal dan teknologi menjadi salah satu hambatan yang menonjol. Masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pariwisata seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dan teknologi yang dibutuhkan. Kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat yang dimana Pemerintah dan masyarakat tidak memberikan dukungan yang cukup terhadap pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Ketidakmampuan dalam pengelolaan dan pemasaran produk pariwisata, banyak masyarakat yang kurang memahami cara mengelola dan memasarkan produk pariwisata yang dimiliki, sehingga produk tersebut sulit untuk dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Hal ini dapat membuat usaha pariwisata sulit berkembang dan tidak mampu bersaing dengan usaha pariwisata lainnya, dan pada akhirnya berujung pada kebangkrutan yang sangat singkat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata seperti dapat didorong dengan adanya sosialisasi ataupun pelatihan dan pengembangan keterampilan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang pariwisata, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat lokal mengenai pariwisata, dan membangun kesadaran masyarakat akan potensi tempat tinggalnya. Dalam memilih strategi pengembangan pariwisata, penting untuk memperhatikan karakteristik dan potensi pariwisata suatu daerah serta mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh bagaimana penerapan kolaborasi pada pengembangan pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat dengan harapan peneliti dapat gambaran bagaimana kolaborasi ini berjalan dengan semestinya. Sehingga, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Kolaborasi dalam Pembangunan Pariwisata berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telagah kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat dan Desa Telagah adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi Pemerintah dalam Perkembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan pendekatan *Triple Helix* pada kasus ini (Studi Kasus Kecamatan Telagah kabupaten Langkat).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell (2016:4) menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui proses mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena sebagai masalah sosial yang kompleks.

Sehubungan dengan penelitian ini maka peneliti berusaha menggambarkan objek yang dikaji dan memahami makna data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan konsep pelayanan publik yang sukses dalam pengembangan layanan-layanan berbasis teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya pemerintah Kota Medan. Melalui pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif maka peneliti berupaya menerjemahkan dan memahami kompleksitas objek penelitian yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data dengan langsung mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data primer ini meliputi observasi terstruktur dan wawancara mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan dalam rangka mendukung teknik pengumpulan data primer. Bentuk dari teknik pengumpulan data sekunder meliputi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan maka sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sumber data sekunder diperoleh peneliti yang merujuk pada data yang sudah ada dan telah dianalisis oleh orang lain.

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data, yaitu penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan, verifikasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Dalam Pengembangan Pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan Triple Helix di Desa Telaga Kabupaten Langkat

Kolaborasi adalah kerja sama antara dua atau lebih individu, kelompok, atau entitas untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Ini melibatkan berbagi ide, sumber daya, keahlian, atau upaya dalam rangka mencapai sesuatu yang mungkin sulit atau tidak mungkin dicapai secara mandiri.

Kolaborasi melibatkan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa berupa individu, tim, organisasi, atau bahkan negara-negara. Pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan bersama atau kepentingan yang saling menguntungkan. Mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan ini. Kolaborasi seringkali melibatkan berbagi sumber daya, seperti keuangan, tenaga kerja, pengetahuan, teknologi, atau infrastruktur. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam kolaborasi. Pihak-pihak yang terlibat harus saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Kolaborasi harus memberikan manfaat atau nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Ini bisa berupa keuntungan finansial, peluang pertumbuhan, peningkatan pengetahuan, atau pencapaian tujuan bersama. Kolaborasi memerlukan fleksibilitas dan toleransi terhadap perbedaan pendapat, budaya, atau cara bekerja. Kemampuan untuk beradaptasi dan menyelesaikan konflik adalah keterampilan yang penting dalam kolaborasi.

Kolaborasi sangat penting dalam berbagai konteks, seperti dunia bisnis, ilmu pengetahuan, seni, pemerintahan, dan proyek-proyek sosial. Ini memungkinkan pihak-pihak yang berbeda untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai secara individu. Kolaborasi ini dapat menjadi pendukung pengembangan pariwisata di desa telaga melalui pendekatan Triple helix dimana melibatkan 3 sektor penting yaitu pemerintah, akademis dan masyarakat dengan tujuan memperdayakan masyarakat melalui pengembangan pariwisata setempat.

Sesuai dengan teori Ansell dan Gash 2007, menjelaskan *Collaborative Governace* adalah suatu peraturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberasi yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. Adapun serangkaian faktor bagi pemangku kepentingan meliputi komitmen, kepercayaan, kepemimpinan, kekuasaan, dialog atau barbagi informasi, dan sumber daya. Dalam hal ini peneliti menggunakan 3 indikator kolaborasi menurut Cris Ansell dan Alison Gash dalam Astuti dkk (2020 : 75) dengan alasan bahwsanya peneliti melihat fenomena dilapangan yaitu Pengembangan Pariwisata dengan tujuan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan pendekatan Triple Helix pada desa telagah dan dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten langkat.

Dalam pembangunan wisata lokal yang lebih baik lagi perlu diadakannya keperdulian dan kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam prosesnya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat melalui wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Kami dari pihak pemerintahan sudah memberikan dukungan untuk masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata ini, tapi tidak sedikit juga masyarakat sebagai pihak pengelola yang belum sadar bahwasannya pentingnya peran kami sebagai pemegang kebijakan dalam keberhasilan kerjasama ini” (Wawancara dengan Ibu Sabarita S.Sos, selaku Kepala Bidang Wisata di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat pada tanggal 26 September 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut keikutsertaan dan keperdulian masyarakat dalam menjalin kerjasama ini sangat berpengaruh, dengan pendekatan Triple Helix sendiri masyarakat disini memiliki bagaian yang berpengaruh dalam prosesnya, yaitu sebagai pihak pengelola yang dimana memerlukan sektor lainnya seperti pemerintah dan akademisi untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang, yakni membangun pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

Hal ini juga diakui oleh kepala Desa Telagah mengenai Kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat melalui wawancara yang dilakukan dengan peneliti sebagai berikut:

“ kalau kerjasama pasti ada, ya seperti pelatihan melalui POKDARWIS itu juga suatu kerjasama yang sudah dilakukan, namun sejauh ini tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan, tapi semoga kedepannya dalam diperbaiki menjadi lebih baik lagi.”(Wawancara dengan bapak Kolen Ginting, selaku Kepala Desa Telagah Kabupaten Langkat pada tanggal 28 September 2023).

Hal serupa juga di jelaskan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Telagah, yang mana beliau juga menegaskan bahwasannya kolaborasi/ kerjasama yang diharapkan sudah terjadi seperti semestinya, namun dibalik itu semua tidak dapat dikatakan sebagai kerja sama yang sempurna, hal ini dibahas dalam wawancara berikut :

“ Dengan adanya kami yang dibentuk sebagai suatu kelompok yang dilatih langsung itu sebuah kerjasama yang terjadi dalam pembangunan pariwisata di DesaTelagah ini” (Wawanacara dengan bapak Roro, Selaku Ketua Kelompok Sadar wisata di Desa Telaga, Di Desa Telaga pada tanggal 07 September 2023).

Dalam Wawancara ini peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwasannya kolaborasi atau kerja sama yang terjalin sudah benar terjadi. Seperti pembentukan Kelompok Sadar Wisata yang mendapatkan pelatihan khusus dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan Menurut Duncan dalam Steers (1985:53) merupakan kesesuaian hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melihat

keseluruhan proses upaya organisasi dalam pencapaian tujuan. Maka pencapaian Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Langkat di Desa Telaga harus dipandang dari proses pencapaian tujuan serta melihat kesesuaian hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program Kelompok Sadar Wisata dilakukan dengan memberikan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat melalui wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

"Kami melakukan beberapa hal sebagai salah satu kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan kreativitas yang sudah mereka miliki, mengingat masih banyak masyarakat yang sudah memiliki kreativitas yang lumayan tetapi belum tau bagaimana caranya agar mereka dapat mengembangkan hal tersebut dan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karena itu kami memberikan beberapa kali dalam setahun untuk kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat. Seperti yang baru saja kami lakukan yaitu pelatihan branding dan digitalisasi pemasaran pariwisata yang dilaksanakan pada 22-24 November 2022." (Wawancara dengan Ibu Sabarita S.Sos, selaku Kepala Bidang Wisata di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat pada tanggal 26 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa pemerintah Kabupaten yang diwakilkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat menyediakan fasilitas pelatihan serta pembinaan yang dilakukan dalam beberapa kali dalam setahun sebagai salah satu upaya dari pemberdayaan yang mereka lakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat melalui partisipasi Kelompok Sadar Wisata Desa Telaga.

Terbentuknya kelompok Sadar Wisata yang diberi pelatihan langsung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merasa sangat terbantu, karna dapat mengotrol destinasi wisata swadaya dengan perpanjangan tangan mereka yaitu kelompok ini.



Gambar 4. 1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat melakukan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata

Sumber : Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat telah melaksanakan kegiatan pelatihan yang diikuti seluruh anggota Kelompok Sadar Wisata. Dari informasi yang Peneliti dapatkan tema pelatihan ini adalah Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata. Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Langkat terkhusus untuk pemasaran desa wisata. Namun, setelah dilakukannya pelatihan tidak ada tindak lanjut seperti pengawasan setelah diadakannya kegiatan tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu anggota

Kelompok Sadar Wisata Desa Telaga melalui wawancara dengan peneliti, Yang menyatakan bahwa:

“Untuk pelatihan-pelatihan yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat memang adanya terlaksana, namun untuk pengawasan selanjutnya itu minim, dapat dikatakan bahwasannya pelatihan-pelatihan tu hanyalah formalitas ataupun ceremonial untuk pihak dinas itu sendiri .” (Wawanacara dengan bapak Roro, Selaku Ketua Kelompok Sadar wisata di Desa Telaga, Di Desa Telaga pada tanggal 07 September 2023).

Pada wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa setelah diadakannya pelatihan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat tidak diadakannya kontrol ataupun pengawasan lebih lanjut pada kelompok tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian tujuan sulit tercapai secara efektif, menurut Siagian (2004:77) yang mengatakan bahwa pencapaian tujuan secara efektif salah satunya dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik maka efektivitas menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian. Dampak yang diperoleh dari adanya pelatihan yang diberikan kepada para pelaksana program yaitu adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai dari masing- masing pelaksana program. Keberhasilan pencapaian tujuan dari kegiatan pelatihan tersebut dapat dilihat dari kemampuan pelaksana program dalam menjalankan kegiatan Kelompok Sadar Wisata untuk mencapai tujuannya.

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata adalah salah satu bentuk upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat dengan tujuan mengembangkan pariwisata lokal yang tersebar di Kabupaten Langkat. Pelaksana program kelompok sadar wisata dalam mencapai tujuan program dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait program kelompok sadar wisata kepada anggota kelompok sadar wisata ataupun masyarakat desa sebagai sasaran program. Adapun tujuan dari program kelompok sadar wisata yaitu meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, dapat bermitra dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan membuka peluang pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kesesuaian yang diperoleh dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, kelompok sadar wisata dan masyarakat sudah mendapatkan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat sebagai salah satu bentuk pemberdayaan yang pemerintah lakukan. Namun, disamping itu belum ada pengawasan dan kontrol lebih lanjut terkait hal tersebut, hal ini tentu sangat disayangkan karena tidak adanya kelanjutan dari setelah diadanya pelatihan yang diberikan. Peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa adanya masalah-masalah yang dapat menjadi penghalang pengembangan pariwisata di Desa Telaga Kabupaten Langkat, maka dari itu peran pemerintah sangatlah dibutuhkan disini mengotrol Kolaborasi antara masyarakat dengan kelompok sadar wisata dan Dinas itu sendiri, hal ini dapat menjadi gerakan yang dapat membuat perkembangan pariwisata lebih maju.

Keterlibatan Stakeholder

Keterlibatan Stakeholder ialah proses melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau dampak terhadap sebuah organisasi, proyek, atau keputusan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Para ahli manajemen, bisnis, dan ilmu sosial telah mengembangkan berbagai teori dan konsep tentang keterlibatan stakeholder.

R. Edwaed Freeman adalah salah satu tokoh utama pengembangan konsep stakeholder. Dia berpendapat bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh operasinya, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lain-lain.

Keterlibatan stakeholder dalam masyarakat merujuk pada proses melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, peran, atau dampak terhadap masalah, proyek, kebijakan, atau inisiatif yang berkaitan dengan masyarakat. Ini bisa mencakup berbagai kelompok, seperti individu, kelompok sosial, organisasi non-profit, bisnis, pemerintah, dan lain sebagainya. Stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dapat menghasilkan

kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini karena berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih komprehensif. Keterlibatan stakeholder membantu mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang mungkin bertentangan. Ini membantu mencegah dominasi satu kelompok kepentingan atas yang lain dan mendorong kompromi yang adil. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat melalui wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Sejauh ini kami sudah banyak terlibat dalam hal-hal pembangunan wisata lokal, seperti menyediakan wadah untuk belajar dan membentuk kelompok Sadar Wisata dan memberikan pelatihannya” (Wawancara dengan Ibu Sabarita S.Sos, selaku Kepala Bidang Wisata di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat pada tanggal 26 September 2023).

Pada wawancara ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariwisata menegaskan sudah melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka dalam proses kegiatan pembangunan wisata lokal Desa Telagah ini.

Keterlibatan stakeholder dalam kolaborasi mencerminkan sejauh mana berbagai pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau inisiatif memiliki peran aktif dalam berkolaborasi, berkontribusi, dan berbagi pengetahuan atau sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Indikator kolaborasi yang mengukur keterlibatan stakeholder dapat mencakup beberapa elemen, yaitu: Kepesertaan Stakeholder, Aktivitas Kolaboratif, Kontribusi dan Sumber Daya, Komunikasi dan Informasi, dalam hal pertukaran informasi, Dukungan dan Persetujuan, Keterbukaan terhadap Masukan, Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan, Keberlanjutan Kolaborasi, Pemantauan dan Evaluasi Bersama, dan Keterlibatan Masyarakat. Indikator-indikator ini membantu mengukur keterlibatan stakeholder dalam proses kolaboratif dan dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kolaborasi serta memperbaiki hubungan antarpihak yang terlibat dalam inisiatif tersebut. Keterlibatan stakeholder yang efektif dapat meningkatkan peluang kesuksesan proyek dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak diperhatikan. Namun dalam temuan lapangan terjadi beberapa perbedaan pendapat yang disampaikan oleh kepala Desa telagah sebagai berikut:

“Saya sebagai Kepala Desa Telagah memang sudah melihat adanya ikut serta pemerintah yakni dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten langkat dalam pembangunan Pariwisata lokal, namun saya merasa kurangnya pengawasan di lapangan yang dimana hal itu mempengaruhi keberhasilan program-program yang diluncurkan atau menjadikan pelatihan yang dilakukan menghasilkan hasil yang kurang memuaskan” (Wawancara dengan bapak Kolen Ginting, selaku Kepala Desa Telagah Kabupaten Langkat pada tanggal 28 September 2023).

Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh salah satu anggota Kelompok Sadar Wisata Desa Telagah dalam wawancaranya dengan peneliti, seperti berikut:

“ kalau dibilang pelatihan ya pasti ada, tapi setelah pelatihan kami merasakan kurangnya pengawasan dalam berjalannya program-program unggulan itu, kami juga tidak sanggup jika hanya berdiri sendiri menghadapi ego masyarakat yang kadang menolak untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan ini” (Wawanacara dengan bapak Roro, Selaku Anggota Kelompok Sadar wisata di Desa Telaga yang aktif dalam mengedukasi turis mengenai wisata syadawa Desa Telaga, Di Desa Telaga pada tanggal 07 September 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sam Sitepu sebagai salah satu pemilik wisata yaitu wisata Danau Karona, sebagai berikut :

“Kalau dilihat dari kami hanya dapat berkomunikasi langsung dengan kepala desa untuk menyampaikan keluhan, dan kami belum pernah mendapatkan kunjungan langsung dari Dinas Pariaswatanya, makannya mereka belum bisa melihat betapa menyedihkannya akses ke wisata kami, kalok prasarananya tidak mendukung pasti berpengaruh pada jumlah kunjungan” (Wawanacara dengan bapak Sam Sitepu, Selaku pihak pengelola wisata syadawa Desa Telaga, Di Desa Telaga pada tanggal 07 September 2023).

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa wawancara dengan narasumber berikut menjelaskan bahwasannya dari ketiga sektor penting dalam Pendekatan *Triple Helix*

Yaitu Sektor pemerintah diaman di sini oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Langkat dan Kepala Desa Telagah yang memiliki peran, Sektor akademisi yang dimana diisi oleh Kelompok Sadar Wisata yang didirikan langsung oleh Pemerintah dan terakhir sektor industri yang diisi oleh pihak pengelola wisata swadaya masyarakat. Dalam indikator Keterlibatan Stakeholder ini pemerintah sudah mengambil andil yang sangat berpengaruh dalam proses ini, namun kontrol yang diperlukan juga masih minim dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Langkat masih sering lepas tangan dengan program-program yang direncanakan, pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan dan melakukan evaluasi pada tujuan-tujuan yang akan disampaikan.

Peran Penting Pemerintahan dalam Proses Pengembangan Pariwisata dengan tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah memainkan peran penting dalam proses pengembangan pariwisata dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup lokal, memelihara budaya dan lingkungan, serta mempromosikan inklusi sosial. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam konteks ini:

1. **Perencanaan dan Kebijakan Pariwisata:** Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk sektor pariwisata. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prioritas. Perencanaan yang baik memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan perkembangan pariwisata ke arah yang mendukung masyarakat setempat.
2. **Pengaturan dan Regulasi:** Pemerintah harus mengatur industri pariwisata untuk memastikan praktik-praktik yang adil, aman, dan berkelanjutan. Ini mencakup pengaturan bisnis pariwisata, perizinan, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan budaya.
3. **Promosi dan Pemasaran Destinasi:** Pemerintah sering berperan dalam mempromosikan destinasi pariwisata secara nasional dan internasional. Promosi yang efektif dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
4. **Pengembangan Infrastruktur:** Pemerintah harus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan, bandara, transportasi umum, dan fasilitas publik lainnya. Ini meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata dan membantu pemberdayaan masyarakat melalui peluang pekerjaan.
5. **Pendidikan dan Pelatihan:** Pemerintah dapat memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk penduduk setempat dalam industri pariwisata. Ini dapat mencakup pelatihan dalam manajemen hotel, pemandu wisata, kerajinan tangan, dan keterampilan lain yang diperlukan dalam sektor ini.
6. **Pengelolaan Lingkungan:** Pemerintah perlu memastikan bahwa pariwisata yang berkelanjutan melibatkan pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Ini mencakup perlindungan alam, pengurangan dampak lingkungan, dan praktik-praktik ramah lingkungan.
7. **Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya:** Pemerintah dapat mempromosikan pariwisata berbasis budaya yang mempertahankan warisan budaya lokal. Ini membantu dalam pelestarian budaya dan menciptakan peluang bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi.
8. **Partisipasi Masyarakat:** Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata. Ini dapat dilakukan melalui dialog publik, konsultasi, dan inklusi dalam komite atau badan pengambil keputusan terkait pariwisata.
9. **Pemantauan dan Evaluasi:** Pemerintah harus memantau dan mengevaluasi dampak pariwisata terhadap masyarakat setempat secara berkala. Ini membantu dalam penyesuaian kebijakan dan praktik-praktik yang ada.

Dengan menjalankan peran-peran ini dengan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata berkontribusi secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan, kualitas hidup, dan pelestarian budaya serta lingkungan lokal. Dalam pelaksanaan kewajibannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah banyak melakukan perannya dalam wujud pengembangan pariwisata di Kabupaten Langkat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat:

"Kami Sudah melakukan upaya-upaya dalam pengembangan wisata lokal, karna kami tau kabupaten kami memiliki potensi wisata yang lumayan besar dan bagus, wujud upaya kami seperti melakukan pelatihan – pelatihan kepada masyarakat karena masyarakat itu sendiri pihak utama yang mengelola wisata swadaya ini, karna banyaknya wisata-wisata lokal yang belum terdaftar di Dinas, maka dari itu kami membentuk Kelompok Sadar Wisata di berbagai Desa di Kabupaten Langkat ini dengan tujuan dan harapan, kelompok ini dapat menjadi perpanjangan ilmu yang sudah kami bekali untuk pengelolaan wisata". (Wawancara dengan Ibu Sabarita S.Sos, selaku Kepala Bidang Wisata di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat pada tanggal 26 September 2023).

Pihak Pemerintah Kabupaten yang di wakikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat menyediakan fasilitas pelatihan yang dilakukan selama beberapa kali dalam kurun waktu satu tahun sebagai salah satu wujud dari pemberdayaan yang mereka lakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat terutama yang sudah ikut serta ke dalam Kelompok Sadar Wisata Perkebunan Bukit Lawang.

Kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata Desa Telaga

Kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata Desa Telaga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, sehingga pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata Desa Telaga:

1. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis merupakan wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata di desanya. Dinas Pariwisata dapat memberikan dukungan dalam pembentukan Pokdarwis, seperti memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat.
2. Pengembangan potensi wisata. Dinas Pariwisata dapat memberikan dukungan dalam pengembangan potensi wisata di desa, seperti memberikan bantuan dana, pelatihan, dan pendampingan bagi masyarakat.
3. Pengelolaan objek wisata. Pokdarwis dapat mengelola objek wisata di desanya dengan melibatkan masyarakat. Dinas Pariwisata dapat memberikan dukungan dalam pengelolaan objek wisata, seperti memberikan pelatihan dan pendampingan bagi Pokdarwis.

Dalam kolaborasi ini, masih banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yang dimana hal ini sangat membutuhkan pembenahan untuk melaksanakan pengembangan pariwisata. Dalam wawancara peneliti dengan kepala Desa Telaga dijelaskan beberapa faktor mengapa bentuk kolaborasi ini mengalami hambatan :

"Untuk wujud nyata dari kinerja Dinas pariwisata bisa kita nilai dari adanya Pokdarwis di Desa ini, dan saya akui hal ini cukup membantu masyarakat selaku pihak pengelola wisata itu sendiri, namun saya sebagai perwakilan masyarakat juga merasa dari segi fasilitas kami kekurangan, contohnya saja signal disini sangat susah jadi hak itu yang menjadi minusnya dari wisata alam ini." (Wawancara dengan Bapak kolen Ginting Kepala Desa Telaga Kabupaten Langkat pada tanggal 28 September 2023).

Dalam wawancara ini menjelaskan bahwasannya bentuk dari kolaborasi 3 pihak ini adalah kelompok Sadar wisata dimana kelompok ini yang menjadi perpanjangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat untuk memberikan pelatihan-pelatihan

kepada pihak-pihak pengelola wisata dalam mengelola wisata yang benar agar dapat berkembang baik dan memberikan mandaat apada pemberdayaan masyarakat Desa Telagah.

Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal, nonverbal, maupun keduanya. Menurut Prof. Dr. Onong Uchjana Effendi (1989), komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna. Menurut Prof. Dr. H. Agus Suryobroto (1993), komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian. Menurut Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat (2010), komunikasi adalah proses penciptaan kebersamaan melalui interaksi yang saling mempengaruhi di antara sejumlah orang.

Komunikasi memainkan peran penting dalam pembangunan pariwisata. Komunikasi dapat digunakan untuk Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pariwisata. Komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang potensi pariwisata, manfaat pariwisata, dan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Komunikasi juga Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata. Komunikasi dapat digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata kepada wisatawan potensial. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, dan promosi langsung, dalam komunikasi juga Membangun kerja sama antar pemangku kepentingan pariwisata. Komunikasi dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik antar pemangku kepentingan pariwisata, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata.

Komunikasi dalam pembangunan pariwisata dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti:

1. Media massa. Media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang pariwisata kepada masyarakat luas.
2. Media sosial. Media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, dapat digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan wisatawan potensial.
3. Promosi langsung. Promosi langsung, seperti pameran pariwisata dan perjalanan wisata, dapat digunakan untuk memperkenalkan destinasi wisata kepada wisatawan potensial.
4. Komunikasi yang efektif dalam pembangunan pariwisata dapat membantu:
 - a. Meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi.
 - b. Meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.
 - c. Menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Komunikasi dan koordinasi merupakan dua fungsi manajemen yang saling berkaitan. Komunikasi merupakan sarana untuk mencapai koordinasi. Koordinasi yang baik tidak dapat tercapai tanpa adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, memberikan instruksi, dan menyelesaikan konflik. Komunikasi yang efektif dapat membantu para anggota organisasi untuk memahami tujuan organisasi, tugas-tugasnya, dan cara untuk mencapainya.

Koordinasi dapat dilakukan melalui komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal biasanya dilakukan melalui saluran-saluran organisasi, seperti rapat, surat, dan memo. Komunikasi informal biasanya dilakukan secara langsung, seperti melalui percakapan, telepon, dan email. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan koordinasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif dapat membantu para anggota organisasi untuk saling memahami dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil Kolaborasi

Kesadaran Masyarakat dalam Proses Pengembangan Pariwisata Desa Telaga

Menurut Fu'ani Diah Qurota Swing dan Abdul Malik (2022), masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan potensi desa wisata berupa tenaga dan pikiran dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil hingga evaluasi yang didalamnya terdapat peran Pokdarwis sebagai motivator, komunikator dan fasilitator yang ditunjukkan oleh pendampingan langsung dan membentuk forum diskusi dengan anggota masyarakat. Pelaksanaan pengembangan potensi dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin setiap tiga bulan dalam pengambilan keputusan hingga evaluasi untuk memajukan program. Penyaluran dana anggaran program pengembangan potensi desa wisata dilakukan dengan sistem Sisa Hasil Usaha (SHU).

Menurut Permatasari dalam Wahyuni dan Margaretta Andini Nugroho (2022) BUMDes memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian di desa, dimana pemerintah menggelontorkan dana desa yang tidak sedikit untuk mendorong percepatan ekonomi di desa. Pemerintah Desa dituntut untuk bisa mengoptimalkan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya meningkatkan peran BUMDes untuk berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian desa, di samping juga meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa). BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan memupuk modal sosial masyarakat Desa.

Menurut Marzellina Hardiyanti dan Amalia Diamantina (2022), beberapa desa wisata yang berkembang dibagi dua tipe dalam pendiriannya. Pertama, Desa Wisata dengan tipe *Bottom-Up*, yaitu desa wisata yang terbentuk dan berkembang atas dasar inisiatif pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi alam, buatan, maupun budaya yang dimiliki sehingga memunculkan ide-ide dari masyarakat desa yang bersangkutan untuk mengembangkan dan mengelola desanya di bidang sektor pariwisata. Kedua, Desa Wisata dengan tipe *Top-Down* yaitu desa wisata yang terbentuk dan berkembang atas inisiatif dari pemerintah daerah yang bersangkutan karena melihat adanya potensi alam, buatan, maupun budaya yang dimiliki sehingga memunculkan ide untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan tata ruang desa yang bersangkutan. Pemerintah daerah menemukan kecenderungan potensi wisata yang bisa berkembang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar dan pendapatan asli daerah. untuk desa wisata Perkebunan Bukit Lawang sendiri berada di tipe *Top-Down* yaitu desa wisata yang terbentuk dan berkembang atas inisiatif dari pemerintah daerah, oleh karena itu dengan adanya desa wisata maka dibentuk Kelompok Sadar Wisata oleh pemerintah daerah dibawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat. Oleh karena itu hal ini yang sering menyebabkan kurangnya koordinasi terkait anggaran program yang seharusnya didapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat atau Desa Perkebunan Bukit Lawang sendiri sebagai desa wisata.

Kendala yang dihadapi oleh Pokdarwis Pesona Bukit Lawang terutama tentang dana tentu akan menghambat mereka dalam melakukan kegiatan, namun seperti yang sudah peneliti jelaskan pada poin pertama diatas bahwa tidak adanya Standar Operasional (SOP) tentu akan mempengaruhi yang mengakibatkan tidak terstrukturanya kegiatan ataupun prosedur yang dilakukan. Hal ini tentu harus ada evaluasi kembali terutama oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat untuk memperbaiki dan memberlakukan aturan yang tertulis melalui standar yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa peningkatan kemampuan yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata Perkebunan Bukit Lawang belum efektif sepenuhnya, hal ini dikarenakan masyarakat masih nyaman menawarkan produk wisata secara langsung kepada wisatawan dibandingkan dengan memasarkannya dengan menggunakan digitalisasi teknologi. Kemudian untuk sarana dan prasarana Kelompok Sadar Wisata belum sepenuhnya efektif hal ini disebabkan masih kurangnya dana dalam menjalankan program kelompok sadar wisata.

SIMPULAN

Dinas pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Langkat sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajibannya dalam instansi yang berwenang dalam pembangunan pariwisata lokal di Desa Telagah. Dinas pariwisata juga melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan pihak akademisi dalam pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Bentuk kerja sama yang dibangun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat dengan masyarakat yang diwakili oleh aparatur Desa yaitu dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata Desa Telagah yang dimana Kelompok ini menjadi perpanjangan tangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat dalam menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pemerintah melalui pelatihan dan sosialisasi yang sudah diberikan kepada Kelompok Sadar Wisata Desa Telagah. Namun disamping itu Kolaborasi dinas pariwisata dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat belum efektif dari sisi partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Masyarakat masih belum memahami konsep pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pariwisata. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara dinas pariwisata dan masyarakat. Dinas pariwisata seringkali tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata.
2. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah seringkali tidak memberikan dukungan yang memadai untuk pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti penyediaan dana, pelatihan, dan pendampingan bagi masyarakat.

Akibat dari kurangnya partisipasi masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi tidak optimal. Masyarakat tidak dapat memanfaatkan potensi pariwisata secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543-571.
- Effendi, Onong Uchjana. 1989. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gokovali, U., & Bahar, O. (2006). Contribution of tourism to economic growth: A panel data approach. *Anatolia*, 17(2), 155–167.
- Kaikara, O. (2020). Tourism Development Strategy. *International Journal Paper Public Review*. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v1i2.15>
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No.5 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2025 pasal 1 ayat 24
- Peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 3 tahun 2011 tentang organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas unit pelaksanaan teknis dinas pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sumatera Utara
- Pusat Studi Otonomi Daerah (POSDA). (2022). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: POSDA.
- Primadany, S. R. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).
- Rakhmat, Jalaluddin. 2010. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, Proses, dan Prosedur*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistyaningsih A.I & Ardika W.I (2017). kolaborasi Pemerintah, Sektor Pariwisata, dan Komunitas Lokal dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan.
- Suryobroto, Agus. 1993. *Komunikasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Winardi. (2004). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winardi. (2001). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yoeti, Oka, A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta, Pradaya Pratama.